

PENDEKATAN KOMUNIKASI DALAM PENANGANAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

(Studi Kampanye Hubungan Masyarakat “Citarum Harum Juara” untuk Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2019)

Fakhri Zakaria¹, Indah Dwianti²

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jl. Gatot Subroto 10 Jakarta Selatan 12710

² Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Jl. Tamansari 55 Bandung

E-mail: fakhri20002@mail.unpad.ac.id; indah20011@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Citarum yang alirannya melintasi 13 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat adalah sungai strategis yang menjadi sumber air irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan sumber air baku untuk air minum serta sebagai lahan perikanan tangkap dan budidaya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)-nya. Namun pencemaran dan kerusakan lingkungan dari wilayah hulu hingga hilir mengakibatkan kerugian besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, dan sumber daya lingkungan di sungai sepanjang 297 kilometer ini. Kurangnya pemahaman masyarakat di DAS Citarum tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi penyebab signifikan terhadap pencemaran. Kampanye PHBS di level rumah tangga kemudian menjadi isu krusial yang perlu dilakukan untuk mendukung penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum di level masyarakat. Studi terdahulu merekomendasikan perlunya intervensi pemerintah dalam memberikan pemahaman mengenai PHBS di masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis pendekatan kampanye komunikasi PHBS Citarum Harum Juara yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat untuk mencapai target peningkatan Nilai Indeks Kualitas Air Citarum melalui analisis strategi kampanye dari pendekatan komunikasi bencana, komunikasi lingkungan, dan kehumasan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata kunci; Citarum, kampanye komunikasi, komunikasi bencana, komunikasi lingkungan, hubungan masyarakat.

THE COMMUNICATION APPROACH TO ENVIRONMENTAL DISASTER MITIGATION

(Study of Communication Campaign for Pollution and Environmental Damage in Citarum River Basin by the Department of Communication and Informatics of West Java Province in 2019)

ABSTRACT

The Citarum River, which has a length of 297 kilometers and flows across 13 regions, is a strategic river that provides as a source of agricultural irrigation water, hydroelectric power, drinking water, and as fisheries and cultivation area in West Java Province. However, pollution and environmental damage from upstream to downstream causes huge losses of health, economy, social, ecosystem, and environmental resources. The lack of understanding of the community in the Citarum River Basin Area (Daerah Aliran Sungai, DAS) about Clean and Healthy Living Behavior (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, PHBS) is a significant cause of pollution. The PHBS campaign at the household level then becomes a crucial issue. Previous studies have recommended the need for government intervention in providing an understanding of PHBS in the community. This research will analyze the communication campaign approach of PHBS Citarum Harum Juara carried out by the Department of Communication and Informatics of West Java Province in 2019 to achieve the target of increasing the Citarum Water Quality Index Score through the analysis of communication campaign strategies from disaster communication, environmental communication, and public relations approaches within qualitative approach.

Keywords: Citarum, communication campaign, disaster communication, environmental communication, public relations.

PENDAHULUAN

Sungai Citarum memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan di wilayah Jawa Barat. Secara geografis wilayah sungai Citarum terletak pada 106° 51'36" - 107° 51' Bujur Timur dan 7° 19' - 6° 24' Lintang Selatan, dengan luas area kurang lebih 11.323 kilometer persegi. Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum melintasi 13 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, sebagian Kabupaten Sumedang, sebagian Kabupaten Cianjur, sebagian Kabupaten Bogor, sebagian Kabupaten Sukabumi, sebagian Kabupaten Subang, dan sebagian Kabupaten Garut.

Wilayah Sungai Citarum mempunyai batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa; sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Kabupaten Cianjur dan sebagian Kabupaten Bandung; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Garut, sebagian Kabupaten Indramayu dan sebagian Kabupaten Sumedang; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Bekasi.

Dengan DAS seluas 690.571, 57 hektar, Citarum menjadi sumber air irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan sumber air baku untuk air minum serta sebagai lahan perikanan tangkap dan budidaya. Terbentang sepanjang 297 km dengan hulu

di Situ Cisanti yang terletak di kaki Gunung Wayang, Kabupaten Bandung dan bermuara di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Citarum mengalirkan air baku untuk kebutuhan domestik untuk sekitar 27 juta penduduk yang bermukim di wilayah yang dialirinya. Selain itu, Citarum juga menjadi sumber air irigasi untuk ratusan ribu hektar sawah serta pembangkit listrik untuk Pulau Jawa dan Bali. Sepanjang bentangnya, terdapat tiga waduk di sungai ini, yaitu Saguling, Cirata, dan Jatiluhur yang memanfaatkan aliran Citarum sebagai sumber pembangkit.

Namun Citarum hari ini dihadapkan pada pencemaran akut yang mengakibatkan kerugian besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, dan sumber daya lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang nyata dari kegiatan antropogenik terhadap perubahan kondisi kualitas air dan habitat Citarum. (Haryani & Triyanto, 2017). Perubahan dan penurunan kualitas ekosistem sungai Citarum terlihat jelas pada bagian tengah, yaitu di daerah Soreang dan Batujajar. Air sungai berwarna hitam pekat dan berbau dengan tumpukan sampah dari berbagai material organik maupun non-organik.

Sesuai Dokumen Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019-2025 terdapat dua persoalan pokok di DAS Citarum yakni pencemaran dan kerusakan. Pencemaran berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam DAS oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran di DAS Citarum menurut dokumen tersebut disebabkan oleh tingginya sedimentasi, pencemaran dari limbah industri, peternakan, pertanian, perikanan (Keramba Jaring Apung), serta air limbah domestik rumah tangga dan persampahan.

Sedangkan kerusakan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan pada di DAS Citarum terjadi pada terbentuknya lahan kritis yang menyebabkan tingginya sedimentasi, adanya kejadian banjir, dan kurangnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air sebagai penyuplai air baku baik untuk keperluan domestik, irigasi, industri, dan lain-lain.

Aspek komunikasi memegang peran signifikan dalam kampanye komunikasi bencana akibat krisis lingkungan seperti yang terjadi di DAS Citarum. Salah satu tujuan utama komunikasi bencana adalah untuk membuat individu dan masyarakat mengambil tindakan (Haddow & Haddow, 2014)

Komunikasi bencana bergerak dalam empat fase (Haddow & Haddow, 2014, p. 17). Dalam fase mitigasi, komunikasi berperan menyampaikan strategi, teknologi, dan aksi yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko kehilangan nyawa dan harta benda akibat bencana. Di fase kesiapsiagaan (*preparedness*), komunikasi berfungsi dalam

menginformasikan juga mendidik publik tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Saat terjadi bencana, komunikasi merespon dengan menyediakan informasi peringatan, evakuasi dan situasi terkini bagi masyarakat terdampak bencana. Sementara di fase pemulihan (*recovery*) setelah bencana, komunikasi berfungsi menyampaikan informasi mengenai bantuan serta upaya-upaya pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana.

Dalam bencana akibat krisis lingkungan, aspek komunikasi memegang peran krusial namun ironis. Aktivitas manusia merupakan penyebab banyak bencana lingkungan, sementara aspek komunikasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas manusia (Jurin, Roush, & Danter, 2010). Dari konsepsi tersebut, alam menjadi titik pusat dalam segala aktivitas komunikasi lingkungan. Komunikasi menjembatani tanda-tanda alam yang diteliti fenomenanya oleh ilmuwan dan peneliti untuk disampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh publik untuk menciptakan pemahaman bersama.

Komunikasi bencana mensyaratkan ada lima elemen yang harus terpenuhi sebagai pondasi yang membangun strategi komunikasi (Haddow & Haddow, 2014, p. 4). Kelimanya meliputi aspek audiens (*customer focus*), komitmen unsur pimpinan, keterlibatan spesialis bidang komunikasi dalam kegiatan analisis situasi, serta penggunaan media (baik media massa konvensional maupun media sosial).

Untuk tataran komunikasi dalam krisis lingkungan, Jurin, Roush, & Danter menggunakan model komunikasi yang alurnya terbagi dalam dua tahapan pokok, yakni tahap perencanaan program komunikasi (*planning*), *eksekusi* (*executing*), dan evaluasi (Jurin et al., 2010, pp. 75–76)

Tahap perencanaan terdiri dari analisis terhadap obyek kampanye komunikasi. Dalam analisis ini dilakukan terdiri dari tahapan observasi problem, penentuan tujuan, analisis audiens, dan penetapan sasaran yang terukur. Hasil analisis kemudian dieksekusi melalui aktivitas produksi pesan, perencanaan media (*media planning*), serta penentuan siapa saja yang menjadi juru bicara (*speakers*). Keseluruhan tahapan ini kemudian dievaluasi yang secara praktik dapat dilakukan baik di tahap awal saat perencanaan, Ketika program berjalan, maupun setelah program selesai. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai yang direncanakan sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Model komunikasi lingkungan yang diajukan oleh Jurin dkk. ini memiliki kesamaan dengan manajemen kampanye hubungan masyarakat. Terdapat empat tahapan dalam model perencanaan program kampanye kehumasan dari Scott M. Cutlip dan Allen H. Center (Broom & Sha, 2013)

Tahap pertama adalah pendefinisian masalah yang merupakan hasil pengamatan obyektif atas realita yang kemudian merumuskan apa yang tengah menjadi masalah dan bagaimana memperbaikinya. Tahapan ini mencakup penelusuran serta pemantauan situasi termasuk sikap, opini, dan pendapat publik (baik internal maupun eksternal) yang terdampak.

Tahapan kedua adalah perencanaan program untuk menentukan keputusan strategik mengenai tujuan dan sasaran program, publik sasaran, juga strategi komunikasi dan kebijakan melalui indikator-indikator target yang terukur. Hasil dari aktivitas riset di tahap pertama menjadi landasan dalam perencanaan program.

Tahapan berikutnya adalah aksi dan komunikasi. Komponen aksi dalam kampanye hubungan masyarakat merupakan tindakan, kebijakan, produk, layanan dan perilaku yang dilakukan oleh organisasi terkait dalam program kampanye (Broom & Sha, 2013, p. 287). Sementara komponen komunikasi mencakup mencakup apa yang harus dikatakan organisasi pada saat krisis meliputi pesan yang akan disampaikan, target khalayak yang dituju, media komunikasi yang akan digunakan, bentuk informasi, pelaku komunikasi atau juru bicara, serta dukungan dari pihak ketiga untuk memperkuat kampanye komunikasi.

Tahap terakhir adalah evaluasi untuk menentukan apakah program kampanye dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Evaluasi menjadi patokan apakah program perlu dilanjutkan, dihentikan, atau dimodifikasi. Baik Jurin, Roush, & Danter maupun Cutlip & Center sama-sama menjadikan tahapan komunikasi sebagai tahapan yang terus berputar alih-alih bergerak dalam model linier. Evaluasi bukan menjadi tahapan final, namun awal untuk masuk ke fase berikutnya.

Dari penjelasan tersebut, pendekatan kampanye kehumasan dapat menjadi pisau bedah dalam menganalisis kampanye komunikasi lingkungan. Terlebih lagi dalam tiga puluh tahun terakhir, perkembangan kampanye hubungan masyarakat telah mencakup isu yang luas termasuk persoalan krisis pencemaran lingkungan (T. W. Coombs & Holladay, 2010)

Dalam kasus Citarum, penelitian Sumartias, Komala, dan Romli pada tokoh masyarakat di desa Linggar dan Cieunteung, Bandung pada 2018 menunjukkan tokoh masyarakat menilai warga kurang memperhatikan kondisi sungai. Para tokoh masyarakat juga berharap banyak dari campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan masalah pencemaran limbah industri dan rumah tangga, termasuk banjir (Sumartias, Komala, & Romli, 2019)

Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini akan melihat sejauh mana intervensi pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana Kelompok Kerja Program Hubungan Masyarakat di Satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum dalam melakukan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama tahun 2019 untuk mendukung capaian program Citarum Harum Juara.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berusaha untuk menyelidiki memahami dan mengungkapkan secara naratif aktivitas masyarakat dalam realitas sosial serta bagaimana mereka memaknai peran/makna individu atau kelompok dalam realita sosial.

Pendekatan ini menuntut peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam penelitian melalui kegiatan penelusuran dokumen, pengamatan perilaku, juga wawancara. (Creswell & David Creswell, 2018; Denzin & Lincoln, 2018)

Sedangkan metode penelitian menggunakan studi kasus. Metode ini adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek suatu individu, kelompok, organisasi, program maupun situasi sosial. (Mulyana, 2018). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, hasil survei, dan data apapun untuk mendapat gambaran kasus secara terperinci.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa observasi kegiatan, dokumen, serta hasil survei dan kajian, serta analisis pemberitaan yang terkait dengan program Citarum Harum Juara. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh diolah kembali agar sistematis dan memudahkan analisis. Data kemudian diklasifikasikan sesuai relevansinya, disajikan dan disimpulkan. Sesuai dengan jenis penelitiannya, hal yang kemudian dilakukan adalah mendeskripsikan data yang diperoleh untuk kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Citarum memiliki permasalahan yang sama panjangnya dengan panjang aliran sungainya. Dokumen Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019-2025 menyebutkan pencemaran dan kerusakan Citarum meliputi pencemaran industri, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah perikanan, dan limbah domestik baik air limbah domestik maupun sampah domestik.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Regulasi ini menjadi dasar normatif program Citarum Harum Juara untuk pelestarian fungsi DAS Citarum sehingga tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercapai dengan indikator utama adalah peningkatan Nilai Indeks Kualitas Air Citarum. Untuk tahun 2019, Nilai Indeks Kualitas Air adalah 34,57 pada tahun 2019; 35,15 untuk target 2020; dan mencapai 40,86 pada tahun 2025. Untuk melakukan percepatan target tersebut, secara terpadu dibentuk Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (PPK) DAS Citarum, yang disebut Tim DAS Citarum dengan Gubernur Jawa Barat sebagai Komandan Satuan Tugas (Satgas) PPK DAS Citarum. Satgas bertugas melakukan percepatan dan keberlanjutan PPK DAS Citarum melalui operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum secara sinergis dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel dan peralatan operasi.

Arah kebijakan pada penanganan DAS Citarum merujuk pada arahan yang tertuang dalam regulasi tersebut yaitu Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS, serta Pemulihan Fungsi DAS. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, disusun strategi dan program pada Tabel 1.

Arah Kebijakan	Strategi	Program
1. Pencegahan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS 2. Penanggulangan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS 3. Pemulihan Fungsi DAS	Menurunkan sedimentasi di DAS Citarum dengan pengurangan erosi melalui penanganan lahan kritis	1. Penanganan Lahan Kritis
	Mengelola limbah yang terdiri dari limbah industri, limbah peternakan, limbah domestik serta persampahan	2. Penanganan Limbah Industri
		3. Penanganan Limbah Peternakan
		4. Penanganan Air Limbah Domestik
		5. Pengelolaan Sampah
		6. Penertiban Keramba Jaring Apung
	Melakukan pengawasan dan penegakan hukum serta penertiban pemanfaatan ruang	7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Citarum
		8. Penegakan Hukum
		9. Pemantauan Kualitas Air
	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	10. Pengelolaan Sumber Daya Air
	Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada industri, insitusi pendidikan, dan masyarakat di DAS Citarum	11. Edukasi
		12. Hubungan Masyarakat

Tabel 1. Matriks Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2015-109. Sumber: Satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Jawa Barat

Berdasarkan data tahun 2019, untuk penanganan limbah domestik, dari 1.431.587 Kepala Keluarga yang bermukim di sepanjang DAS Citarum, baru 718.084 yang tertangani limbah domestiknya. Untuk limbah peternakan masih 65% dari jumlah 22.400 ekor yang belum teratasi dan kotoran ternak tersebut dibuang langsung ke sungai tanpa proses pengolahan yang memadai. Hal tersebut sangat berpengaruh untuk masyarakat karena pencemaran-pencemaran tersebut sangat merugikan untuk kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kurangnya pemahaman masyarakat di DAS Citarum tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi penyebab signifikan terhadap pencemaran.

Kampanye PHBS di level rumah tangga kemudian menjadi isu krusial yang perlu dilakukan untuk mendukung penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum di level masyarakat. Dalam struktur Satuan Tugas (Satgas) PPK DAS Citarum, kampanye PHBS dilakukan melalui program kerja Hubungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat

Berangkat dari persoalan yang telah diidentifikasi tadi, Diskominfo Jawa Barat kemudian menyusun tujuan dan sasaran kampanye PHBS. Peningkatan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat tentang PHBS melalui komunikasi perubahan perilaku yang komprehensif di desa prioritas menjadi tujuan kampanye PHBS. Sementara sasarannya adalah jumlah desa prioritas di DAS Citarum yang terintervensi oleh kampanye PHBS. Terdapat 29 desa prioritas di DAS Citarum yang menjadi target intervensi oleh kampanye PHBS di tahun 2019. Jumlahnya diharapkan meningkat setiap tahunnya, dengan rincian 129 desa terintervensi pada tahun 2020, 229 desa pada tahun 2021, 329 desa di tahun 2022, 429 desa pada tahun 2023, 529 desa di tahun 2024, dan 629 desa pada tahun 2025.

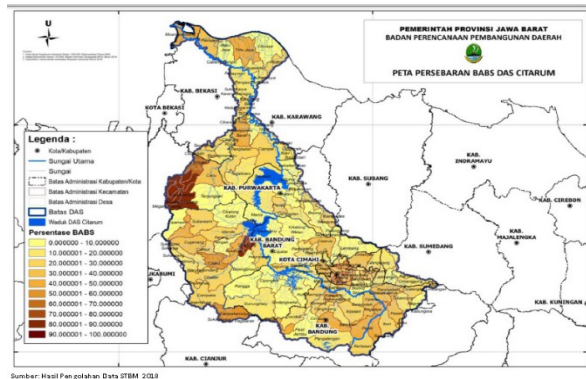
Dalam aspek komunikasi, kampanye PHBS mengacu pada pelaksanaan PHBS di level rumah tangga yang disusun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terdapat beberapa perilaku hidup sehat di subyek rumah tangga yang terdiri dari persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita tiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, pengelolaan air minum dan makan di rumah tangga, menggunakan jamban sehat (Stop Buang Air Besar Sembarangan), pengelolaan limbah cair di rumah tangga, membuang sampah di tempat sampah, memberantas jentik nyamuk, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah, dan lain-lain

Sementara untuk kampanye PHBS Citarum Harum Juara, Diskominfo Jawa Barat menitikberatkan pada tujuh perilaku. Ketujuh perilaku ini meliputi: stop Buang Air Besar sembarangan, tidak membuang kotoran ternak langsung ke sungai, cuci tangan pakai sabun, membuang sampah pada tempatnya, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah industri dan rumah tangga secara aman, dan pengelolaan limbah peternakan.

Hal ini berdasarkan hasil pemantauan kualitas air di tujuh titik yang menunjukkan bahwa sekitar 26 persen area masih tercemar berat. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencemar Air; dengan tujuh parameter utama yaitu TSS, DO, BOD, COD, *fosfat*, *fecal coli*, dan *total coli* dengan penyumbang terbesar cemar berat berasal dari *fecal coli*. *Fecal coli* merupakan bakteri yang berasal dari kotoran hewan dan manusia dan memiliki risiko yang langsung dapat dirasakan oleh manusia yang mengonsumsinya.

Tidak terdapatnya pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah bagi penduduk di sempadan sungai menyebabkan tingginya kadar bakteri *fecal coli* dan tingginya sampah di DAS Citarum. Berdasarkan data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kementerian

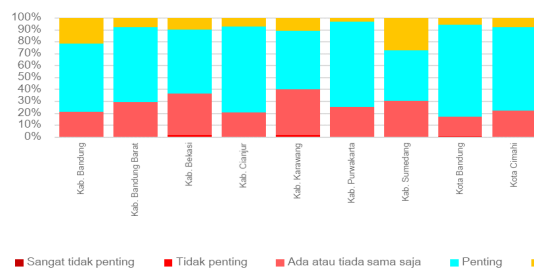
Kesehatan, masih terdapat penduduk di DAS Citarum yang melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Berdasarkan data STBM, angka BABS tertinggi yang ada di DAS Citarum mencapai 82 persen. Permasalahan mendasar yang menyebabkan hal tersebut adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sehingga praktik BABS dan membuang sampah sembarangan masih ada.



Grafis 1. Peta Persebaran BABS DAS Citarum.
Sumber: Satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Jawa Barat

Untuk audiens sasaran, kampanye PHBS Citarum Harum Juara menyasar aparatur desa dan organisasi kemasyarakatan di bawahnya seperti Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagai audiens sasaran. Mereka dipersiapkan sebagai agen informasi yang mengedukasi masyarakat desa secara berkelanjutan, dengan pertimbangan kemudahan dalam koordinasi melalui skema birokrasi pemerintah dan aspek pendanaan melalui mekanisme dana desa.

Selain itu, hal tersebut diperkuat dari hasil temuan lapangan. Dalam survei persepsi masyarakat di DAS Citarum, mayoritas responden (70 persen) menganggap peran perangkat desa (lurah, kepala Rukun Tetangga/Rukun Warga) berperan penting dalam mengawal program Citarum Harum Juara.



Grafis 2. Survei Persepsi Masyarakat di DAS Citarum tentang Elemen Lurah, RT, dan RW. Sumber: Satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Jawa Barat

Untuk pemilihan media komunikasi, Diskominfo Jawa Barat merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informasi. Dari regulasi tersebut, media yang dipilih meliputi: media cetak, media penyiaran, media daring, media sosial, media luar ruang, dan komunikasi tatap muka.

Pertimbangan perilaku konsumsi media menjadi acuan dalam pemilihan medium. Media cetak, media penyiaran dan media daring banyak digunakan untuk aktivitas kampanye di wilayah hulu Citarum meliputi kampanye melalui surat kabar (Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, dan Republika), radio (RRI, PRFM), dan situs berita (Pikiran Rakyat, Republika Online, Sindo) dalam format iklan layanan masyarakat.

Wilayah perkotaan seperti Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat lebih ditekankan pada interaksi melalui media sosial di akun Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube @satgascitarum dan @diskominfojabar. Di wilayah ini, kampanye juga menggunakan media luar ruang seperti billboard di empat titik serta satu titik videotron.

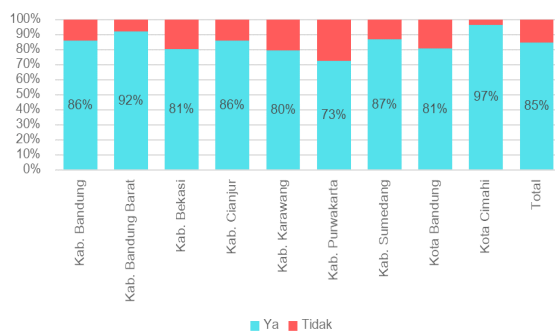
Sedangkan untuk daerah hilir Citarum seperti Cirebon dan Karawang, medium tatap muka melalui menjadi pilihan. Kesenian yang dipilih adalah wayang golek sesuai masukan dari Dinas Pariwisata setempat. Dalam pertunjukan tersebut juga akan disisipkan pesan-pesan tentang lingkungan lewat maskot Boni, Arum, Bara dan Baung yang merupakan representasi dari manusia, flora dan fauna. Arum berasal dari tumbuhan tarum (*Indigofera tinctoria*) yang menjadi asal nama sungai Citarum. Boni dan Baung adalah ikan tawes (*Barbonymus gonionotus*) dan ikan baung tagueh (*Hemibagrus nemurus*) yang merupakan spesies ikan yang habitat hidupnya di Citarum. Sementara Boni adalah sosok masyarakat yang tinggal di wilayah DAS Citarum.

Untuk kegiatan komunikasi tatap muka melalui diskusi kelompok terpadu (*focus group discussion*) telah dilakukan di Kabupaten Bandung, Purwakarta, Karawang dan Cianjur. Namun karena pandemi COVID-19, kegiatan komunikasi melalui medium tatap muka ini belum maksimal dilakukan. Kampanye melalui kesenian juga belum dilakukan karena pandemi.

Dalam aspek aksi dan kebijakan, Diskominfo Jawa Barat membangun mekanisme aspirasi dan pengaduan publik. Mekanismenya dilakukan secara *offline* melalui penyebaran kuisioner di kelurahan/kecamatan prioritas yang hasilnya dipublikasikan di website Citarum Harum Juara (<http://citarumharum.jabarprov.go.id/>). Selain itu secara fisik juga dibangun *Command Center* Citarum Harum Juara di Jalan Naripan, Bandung sebagai pusat komando kegiatan berbasis *Internet of Things*.

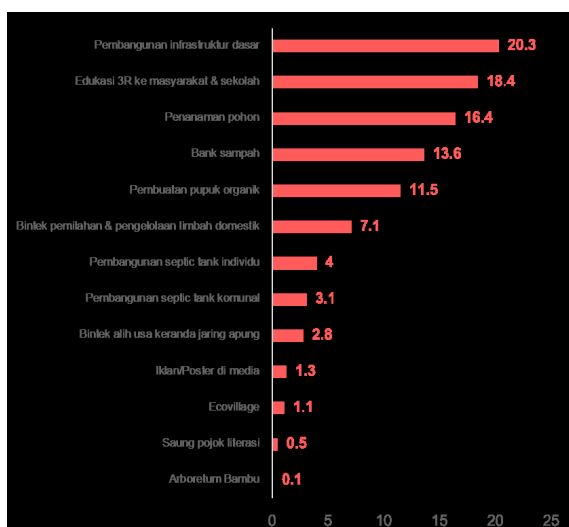
Selama 2019, kampanye PHBS Diskominfo Jawa Barat telah berhasil memenuhi target 29 desa terintervensi PHBS. Mengacu Nilai Indeks Kualitas Air yang menjadi indikator utama Citarum Harum Juara, kualitas air Citarum saat ini berada di kategori cemar ringan di angka 40,67 berdasarkan keterangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 19 Juni 2020.

Berdasarkan survei persepsi masyarakat tentang tingkat optimisme program Citarum Harum Juara, mayoritas responden (85 persen) optimis bahwa Citarum Harum Juara akan terwujud di tahun 2025 yang menjadi tahun akhir program.



Grafis 3. Survei Persepsi Masyarakat di DAS Citarum tentang Tingkat Optimisme Masyarakat & Keinginan Berpartisipasi. Sumber: Satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Jawa Barat

Meski demikian, aspek koordinasi masih menjadi catatan evaluasi. Baik koordinasi antarsektor maupun dalam pelaksanaan di lapangan. Misal terkait aspirasi warga untuk pengadaan infrastruktur kebersihan, yang menjadi program terkait Citarum Harum Juara yang paling ingin diikuti warga sesuai hasil survei persepsi dalam tabel, wewenang Diskominfo hanya sebatas menyampaikan kebutuhan warga tersebut ke dinas terkait yang tentunya memerlukan jalur birokrasi yang memakan waktu. Sementara adanya kesenjangan antara perangkat desa dengan warga menjadi faktor yang menghambat dalam kegiatan kampanye PHBS selama tahun 2019.



Grafis 4. Survei Persepsi Masyarakat di DAS Citarum tentang Tingkat Optimisme Masyarakat & Keinginan Berpartisipasi. Sumber: Satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Jawa Barat

Sebagian besar studi tentang komunikasi bencana menunjukkan kegagalan dalam mengenali cara penerima informasi, khususnya bagaimana masyarakat yang terkena dampak memahami risiko bencana (Gultom, 2016). Padahal Perserikatan Bangsa Bangsa melalui *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* telah mengamanatkan untuk mendorong pendekatan berbasis masyarakat terdampak (*people centered approach*) dalam upaya mitigasi bencana (U.N Office for Disaster Risk Reduction, n.d.).

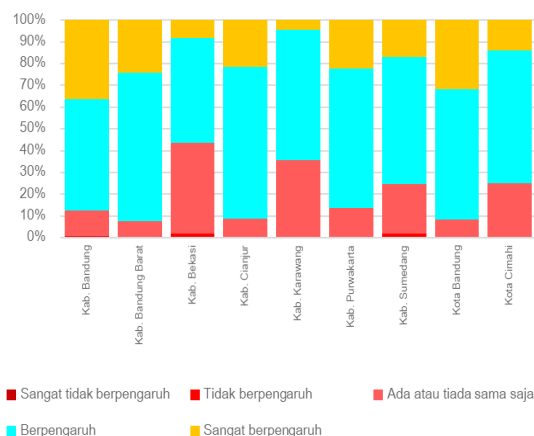
Beberapa studi tentang komunikasi bencana di wilayah DAS menekankan pentingnya menempatkan masyarakat terdampak sebagai pihak yang seharusnya

mendapat porsi untuk secara aktif memahami, mendefinisikan, merespon, serta melakukan langkah-langkah mitigasi risiko bencana sesuai karakteristik mereka (Alfian, Rachmaditya, Marliyana, Apriliyana, & Adiansyah, 2020; Rollason, Bracken, Hardy, & Large, 2018; Susilowardhani, Djuhardi, & Yulianti, 2018)

Dalam kasus kampanye PHBS Citarum Harum Juara yang dilakukan oleh Diskominfo Jawa Barat, pelibatan masyarakat direpresentasikan melalui unsur perangkat desa. Mereka dianggap telah mengerti karakteristik masyarakat setempat dan diharapkan dapat melakukan diseminasi informasi serta pemberdayaan kepada masyarakat terdampak DAS Citarum secara lebih intens. Singkatnya, keberadaan perangkat desa sebagai audiens dalam kampanye ini diposisikan sebagai agen informasi program Citarum Harum Juara kepada masyarakat terdampak.

Selain dari unsur perangkat desa, kampanye PHBS Citarum Harum Juara juga melibatkan unsur TNI. Pelibatan TNI dikukuhkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 melalui penetapan sebagai Wakil Komandan Bidang Penataan Ekosistem I dan II yaitu Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta. Pelibatan TNI dalam implementasi program ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan pengkondisian masyarakat, perangkat desa, dan pelaku usaha. Sedangkan perangkat daerah/dinas teknis baik pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota bertugas untuk menginisiasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di DAS Citarum.

Selain memiliki landasan secara legal formal, pelibatan unsur TNI ini juga mengacu pada penilaian atas persepsi masyarakat terdampak di DAS Citarum. Keberadaan aparat TNI dinilai relatif berpengaruh perwujudan Citarum Harum oleh masyarakat terdampak. Secara rata-rata, lebih dari 85 persen responden memandang pentingnya peran TNI.



Grafis 5 dan 6. Survei Persepsi Masyarakat di DAS Citarum tentang Pengaruh dan Kehadiran Elemen TNI. Sumber: Satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Jawa Barat

Adanya sosok-sosok agen informasi ini memperlihatkan adanya proses komunikasi dua tahap, di mana pesan yang disampaikan melalui medium

komunikasi diinterpretasikan terlebih dahulu oleh sosok pembentuk opini publik (*opinion leaders*) sebelum disampaikan kepada khalayak dalam jaringannya melalui saluran komunikasi interpersonal (Katz & Lazarsfeld, 1955). Lebih lanjut, peran komunikasi interpersonal ini berpengaruh penting dalam proses pengambilan keputusan oleh individu.

Dalam komunikasi interpersonal, *familiarity*, kedekatan (*proximity*), dan ganjaran (*reward*) menjadi faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal (Rakhmat, 1999). *Familiarity* berarti sering kita lihat atau sudah dikenal dengan baik. Sementara *proximity* mengacu pada adanya kedekatan. Kampanye PHBS Citarum Harum Juara menjadikan faktor perangkat desa sebagai sosok yang relatif dikenal (utamanya dalam hal administrasi untuk hajat hidup sehari-hari) dan kedekatan (terutama secara ruang fisik) sebagai pertimbangan dipilihnya sosok-sosok ini sebagai agen informasi untuk menyampaikan pesan-pesan yang mendukung tercapainya tujuan kampanye tersebut.

Sementara aspek ganjaran adalah kecenderungan mencari motif keuntungan dalam interaksi sosial (Rakhmat, 1999, p. 115) Teori pertukaran sosial (*social exchange*) menilai individu akan berinteraksi secara lebih intens jika ada keuntungan dalam proses komunikasi interpersonal. Respon secara langsung (seperti sikap baik atau bahkan menolak) didorong oleh prinsip timbal balik berupa pemberian manfaat antara kedua belah pihak (Littlejohn & Foss, 2009). Diskominfo Jawa Barat memberikan skema *reward* kepada desa yang menerapkan prinsip PHBS melalui skema Lomba Dokumentasi Kegiatan Citarum Harum Juara yang diadakan setiap bulan mulai dari bulan Juli hingga Desember 2020 dengan hadiah berupa alat kebersihan. Perangkat desa yang menjadi juara akan menjadi Relawan Citarum Harum Juara dengan diberikan Surat Keputusan Ketua Harian Satgas PPK DAS Citarum serta mendapat fasilitas berupa seragam rompi dan topi.

Adanya faktor-faktor situasional pengaruh atraksi interpersonal ini berperan signifikan dalam kampanye komunikasi berbasis pada penguatan kapasitas masyarakat. Hal ini elemen kepercayaan masyarakat serta kredibilitas agen informasi menjadi faktor penting dalam komunikasi bencana pada masyarakat terdampak (Jurin et al., 2010, p. 277)

Dalam lingkup produksi pesan, komunikasi bencana dalam konteks komunikasi krisis lingkungan mencakup komponen *hazard* (bahaya) dan *outrage* (kemarahan) (p. 267-268). *Hazard* merupakan komponen pemantauan dan pengukuran secara ilmiah tentang seberapa berbahaya suatu permasalahan. Komponen pengukuran ini mencakup probabilitas (*probability*) sebagai kemungkinan statistik bahwa suatu masalah dapat muncul serta konsekuensi (*consequences*) yang merupakan prediksi jika masalah menjadi nyata

Sedangkan *outrage* merupakan persepsi (nyata atau khayalan) dari suatu masalah. Ada kecenderungan beberapa kelompok dalam masyarakat tidak menyukai kenyataan berbasis temuan ilmiah mengenai potensi risiko bencana. Ketidaksukaan tersebut kemudian dilampiaskan dalam

bentuk-bentuk kemarahan yang cenderung tidak didasarkan pada data yang dihasilkan melalui metode ilmiah. Situasi ini kemudian memunculkan ketegangan yang tertanam dalam setiap wacana tentang hal-hal berisiko.

Dalam kampanye PHBS Citarum Harum Juara, potensi bahaya telah diukur melalui berbagai indikator yang datanya disediakan oleh berbagai sektor terkait. Indikator ini kemudian menjadi acuan dalam perencanaan program kampanye. Selain itu, indikator adanya potensi risiko bencana, serta capaian dalam upaya penanggulangan bencana, ini disampaikan dalam pesan-pesan komunikasi dalam kegiatan kampanye, meski hanya ditampilkan dalam bentuk yang sederhana untuk memudahkan pemahaman publik awam di luar segmentasi pengakses data terkait. Sejauh ini Diskominfo Jawa Barat belum menemukan adanya kecenderungan penolakan masyarakat terdampak dalam kegiatan kampanye PHBS Citarum Harum Juara

Dalam aspek distribusi pesan, perkembangan teknologi informasi telah berpengaruh signifikan dalam pola-pola distribusi pesan di lingkup komunikasi bencana. Internet serta kemudahan koneksi dalam telepon genggam memberikan mengubah audiens yang sebelumnya pasif menjadi audiens aktif lewat keterlibatan di *platform* web dan media sosial. Keberadaan media sosial telah terbukti menjadi perangkat yang berperan besar dalam situasi bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti badai Harvey dan Sandy di Amerika Serikat; gempa bumi dan Tsunami Tohoku, Jepang; gempa bumi di Italia dan Chile; serta banjir di Queensland, Australia (Acar & Muraki, 2011; Li, Stephens, Zhu, & Murthy, 2019; Lovari & Bowen, 2020)

Keberadaan media sosial dalam kampanye PHBS Citarum Harum Juara selain difungsikan sebagai medium penyebaran pesan, juga menjadi *platform* partisipasi publik. Publik memanfaatkan akun Instagram @satgascitarumharum sebagai sarana penyampaian aduan adanya pencemaran atau perilaku yang tidak mencerminkan kaidah PHBS. Media sosial kemudian menjadi skema pemantauan situasi yang memberikan kecepatan dan efektivitas respon untuk kondisi yang berubah-ubah serta *platform* untuk pemantauan situasi secara *real-time* (T. W. Coombs & Holladay, 2010; W. T. Coombs, 2015).

SIMPULAN

Jika merujuk pada indikator kuantitatif, kampanye PHBS Citarum Harum Juara oleh Diskominfo Jawa Barat selama 2019 telah memenuhi tujuan dan sasaran program kampanye. Meski demikian, perlu adanya pendekatan yang lebih intensif serta mendalam kepada masyarakat terdampak mengingat komunikasi bencana bukan sekadar dimaknai sebagai fungsi pemberian informasi semata (Gultom, 2016, p. 25). Komunikasi bencana merupakan pemaknaan serta pemahaman bersama tentang potensi risiko bencana lewat beragam cara dalam beragam latar belakang masyarakat terdampak bencana sebagai audiens.

Riset-riset berbasis audiens seperti analisis resepsi serta penelitian tentang pola konsumsi media sangat diperlukan untuk mendapat pemahaman yang lengkap mengenai karakteristik masyarakat terdampak DAS

Citarum dari semua aspek. Pemahaman ini berguna sebagai dasar bukan hanya dalam kepentingan praktis kampanye PHBS Citarum Harum Juara namun juga menjadi pijakan dalam kebijakan-kebijakan publik mengenai mitigasi bencana akibat krisis lingkungan di wilayah DAS Citarum.

Adanya pendekatan komunikasi melalui budaya, meski belum dilakukan mengingat pandemi COVID-19, juga perlu menjadi pertimbangan penting untuk pelaksanaan ke depan. Elemen budaya dan komunikasi dalam komunikasi bencana merupakan elemen yang saling terkait yang keberadaannya saling mempengaruhi satu sama lain. Budaya memberikan cetak biru yang menentukan cara seseorang memahami, memaknai, dan berperilaku dalam masyarakat sementara komunikasi menyampaikan nilai-nilai tersebut (Jurin et al., 2010, p. 189)

Keberadaan medium komunikasi tradisional dalam kampanye PHBS Citarum Harum Juara perlu diperluas lagi bukan hanya dimaknai sebatas penggunaan kesenian tradisional untuk gimmick penarik massa dalam kegiatan kampanye komunikasi yang dilakukan Diskominfo Jawa Barat. Pemanfaatan komunikasi tradisional melalui medium-medium komunikasi berbasis pengetahuan dan kearifan lokal bahkan perlu disejajarkan intensitas penggunaannya dengan medium komunikasi massa yang menggunakan pendekatan teknologi terbaru mengingat kecanggihan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas keberhasilan kampanye komunikasi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Acar, A., & Muraki, Y. (2011). Twitter for crisis communication lessons learned Japan Tsunami disaster. *International Journal Web Based Communities*, 7(3), 392–402.
- Alfian, A., Rachmaditya, R. F., Marliyana, R., Apriliany, S., & Adiansyah, D. (2020). Pendekatan Active Citizen dalam Pemetaan Masalah Terkait Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Desa Sindangpakuon. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 119. Retrieved from <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.24588>
- Broom, G. M., & Sha, B.-L. (2013). *Cutlip and Center's Effective Public Relations Eleventh Edition* (11th Edition). Boston: Pearson.
- Coombs, T. W., & Holladay, S. J. (2010). *The Handbook of Crisis Communication*. West Sussex: Wiley-Blackwell
- Coombs, W. T. (2015). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding* (Fourth Edition). Thousand Oak, California: SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Gultom, D. I. (2016). *Trustworthy and participatory community-based disaster communication: A case study of Jalin Merapi in the 2010 Merapi eruption in Indonesia*. Canterbury. Retrieved October 11, 2020 from <http://dx.doi.org/10.26021/4919>
- Haddow, G. D., & Haddow, K. S. (2014). *Disaster Communications in a Changing Media World*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Haryani, G. S., & Triyanto, T. (2017). Dampak Kegiatan Antropogenik Terhadap Keragaman Komunitas Ikan di Sungai Citarum. In *Pertemuan Ilmiah Masyarakat Limnologi Indonesia Tahun 2017* (pp. 237–247). Bogor: Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Jurin, R. R., Roush, D., & Danter, J. (2010). *Environmental Communication: Skills and Principles for Natural Resource Managers, Scientists, and Engineers. Environmental Communication: Skills and Principles for Natural Resource Managers, Scientists, and Engineers* (Second Edition). Dordrecht: Springer Netherlands. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/978-90-481-3987-3>
- Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). *Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communication*. New York: Free Press.
- Li, J., Stephens, K. K., Zhu, Y., & Murthy, D. (2019). Using social media to call for help in Hurricane Harvey: Bonding emotion, culture, and community relationships. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 38. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101212>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Littlejohn, S., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia of Communication Theory*. Thousand Oak, California: SAGE Publications, Inc.
- Lovari, A., & Bowen, S. A. (2020). Social media in disaster communication: A case study of strategies, barriers, and ethical implications. *Journal of Public Affairs*, 20(1). Retrieved from <https://doi.org/10.1002/pa.1967>
- Mulyana, Deddy. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarta
- Office for Disaster Risk Reduction, U. N. (n.d.). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030*. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction

- Rakhmat, J. (1999). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rollason, E., Bracken, L J, Hardy, R J, & Large,. (2018). Rethinking flood risk communication. *Natural Hazards*, 92, 1665–1686. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s11069-018>
- Satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Jawa Barat. (n.d). Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Jawa Barat 2019-2015. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Sumartias, S., Komala, L., & Romli, R. (2019). Model of Environmental Communication over the Citarum River. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 248). Institute of Physics Publishing. Retrieved from <https://doi.org/10.1088/1755-1315/248/1/012058>
- Susilowardhani, E. M., Djuhardi, L., & Yulianti, I. (2018). Risk Communication in Reducing Flood Risk in Jakarta. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 145). Institute of Physics Publishing. Retrieved from <https://doi.org/10.1088/1755-1315/145/1/012085>

Website

- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (19 Juni 2020). *Kualitas Air Sungai Citarum Sudah Membaik*. Retrieved October 11, 2020 from <https://jabarprov.go.id/index.php/news/38170/2020/06/19/Kualitas-Air-Sungai-Citarum-Sudah-Membaik>